

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Stakeholder Theory*

Freeman (1984) dalam Roberts (1992) mendefinisikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti sebuah kelompok atau individual yang dapat memberi dampak atau terkena dampak oleh hasil tujuan organisasi. Pihak-pihak yang termasuk dalam pemangku kepentingan yaitu masyarakat, bisnis, administrasi publik lain, politisi, parlemen dan lembaga peradilan serta media (Roberts,1992). Organisasi harus peduli dengan kepentingan pemangku kepentingan ketika membuat keputusan strategis. Perusahaan atau organisasi bisnis harus mempertimbangkan kebutuhan, kepentingan, dan pengaruh dari orang-orang atau kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan dan operasi (Frederick et al., 1992 dalam Mainardes et al., 2011).

Stakeholder theory menekankan akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana (Rokhlinasari, 2016). Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk

memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh pemangku kepentingan (Rokhlinasari, 2016). Stakeholder theory mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan memerlukan dukungan dan kepercayaan dari pemangku kepentingan, sehingga aktivitas perusahaan juga mempertimbangkan persetujuan dari pemangku kepentingan.

Salah satu cara untuk memenuhi keinginan pemangku kepentingan adalah dengan melakukan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengelola kepercayaan para pemangku kepentingan, dimana keberadaan pemangku kepentingan sangat mempengaruhi pola pikir dan persepsi manajemen terhadap urgensi praktik akuntansi entitas. Pemangku kepentingan dan organisasi saling mempengaruhi dari hubungan sosial keduanya dalam bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas yang diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan yang handal, relevan, tepat waktu dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan. Apabila laporan keuangan yang dilaporkan itu valid dan berkualitas, nantinya pemangku kepentingan dapat menggunakan informasi keuangan tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Dapat dikatakan bahwa kinerja instansi tersebut baik dan akan berdampak pada meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut dan kepercayaan dari pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah untuk meminta pertanggungjawaban. Dalam konteks organisasi sektor publik, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*). Akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilakukan organisasi sektor publik (Mardiasmo, 2009). Menurut Ellwood (1993) dalam (Mardiasmo, 2009) terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran merupakan akuntabilitas yang terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum berkaitan dengan jaminan

adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur akuntansi. Akuntabilitas proses dapat termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap jalannya akuntabilitas proses dapat dilakukan dengan memeriksa ada tidaknya pungutan-pungutan lain, adanya sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan serta pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan mempertimbangkan alternatif program yang akan memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah pusat maupun daerah atas

kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Menurut Cahyani dan Utama (2015) bahwa akuntabilitas merupakan instrumen kegiatan kontrol yang terkait dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya dengan transparan kepada masyarakat. Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja ini perlu mempertimbangkan beberapa komponen yaitu biaya pelayanan, penggunaan, kualitas dan standar pelayanan, cakupan pelayanan dan kepuasan (Mardiasmo, 2009).

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Indikator kinerja hendaknya spesifik dan jelas, dapat diukur secara obyektif, relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan tidak bias. Mahmudi (2005) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan pengukuran hasil dan efisiensi jasa atau program berdasarkan basis reguler (tetap, teratur). Untuk melakukan pengukuran kinerja, diperlukan

informasi akuntansi terutama menentukan indikator kinerja (performance indicator) sebagai dasar penilaian kinerja. Manajemen akan mengalami kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang memadai.

Dalam pengukuran kinerja, informasi yang digunakan dikelompokkan dalam dua kategori yaitu informasi keuangan (penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat) dan informasi non keuangan. Dengan dilakukannya pengukuran kinerja, instansi dapat melakukan evaluasi dan mengambil keputusan agar kinerja instansi semakin baik dan akuntabilitas kinerja instansi semakin meningkat.

3. Kejelasan Sasaran Anggaran

Kenis (1979) menyatakan bahwa terdapat beberapa karakteristik sistem penganggaran. Salah satu karakteristik tersebut adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran merupakan gambaran sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara spesifik yang bertujuan agar dimengerti oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pencapaiannya (Kenis, 1979). Anggaran yang jelas dapat membantu para manajer (Kepala SKPD) dalam melaksanakan fungsi anggaran dan pengendalian sehingga tujuan organisasi tercapai dengan

baik. Semakin tepat dalam membidik sasaran anggaran, maka akan semakin baik akuntabilitas kinerja suatu instansi.

Menurut Kenis (1979), indikator yang digunakan dalam mengukur kejelasan sasaran anggaran adalah:

1. Jelas, artinya sasaran anggaran yang ingin dicapai harus diuraikan secara jelas serta tidak bermakna ganda (ambigu)
 2. Spesifik, artinya sasaran anggaran yang ingin dicapai harus diuraikan secara spesifik dan detail, agar tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam – macam.
 3. Dapat dimengerti, artinya sasaran anggaran yang ingin dicapai mudah dimengerti serta menjadi prioritas utama
- 4. Pengendalian Akuntansi**

Pengendalian akuntansi meliputi strategi organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan dan catatan organisasi, mengecek ketelitian dan valid tidaknya data-data akuntansi (Kholis, 2007). (Kholis, 2007) menjelaskan bahwa sistem pengendalian akuntansi berfungsi sebagai alat dalam menyediakan informasi yang bermanfaat untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dari berbagai alternatif aktivitas informasi sistem. Apabila instansi pemerintah memiliki sistem akuntansi yang handal dan diterapkan dengan praktik yang sehat maka informasi akuntansi yang dihasilkan dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kinerja instansi yang bersangkutan

dan sebaliknya. Dengan tidak efektif dan efisien pemanfaatan sumber daya akan mengakibatkan penurunan pelayanan masyarakat dan penurunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang bersangkutan

5. Sistem Pelaporan

Belkaoui (2000) menjelaskan bahwa akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah. Setiap pemegang amanah diwajibkan untuk melaporkan kepada publik mengenai aktivitas apa saja yang telah mereka lakukan termasuk posisi keuangan instansi tersebut.

Tujuan umum pelaporan keuangan sektor publik adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu organisasi atau perusahaan yang kelak dapat digunakan bagi yang berkepentingan untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dimanfaatkan suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan. Dapat dikatakan sistem pelaporan yang baik jika laporan telah disusun secara jujur, objektif dan transparan, sudah sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) dan persyaratan pelaporan keuangan organisasi sektor publik (Bastian, 2010).

6. Motivasi Kerja

Penting bagi setiap pegawai mempunyai motivasi kerja terutama untuk memacu seseorang untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya, tanpa adanya motivasi kerja maka pekerjaan yang harusnya cepat selesai akan tertunda. Motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja, singkatnya motivasi kerja adalah pendorong semangat kerja. Menurut Kadarisman (2012), motivasi kerja adalah penggerak atau pendorong dalam diri seseorang untuk mau berperilaku dan bekerja dengan giat dan baik sesuai dengan tugas dan keajaiban yang telah diberikan. Sedangkan menurut Masrukhin dan Waridin (2006) mengemukakan bahwa motivasi merupakan faktor psikologis yang menunjukkan minat individu terhadap pekerjaan, rasa puas, dan ikut bertanggung jawab terhadap aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang telah dipaparkan, maka dapat di simpulkan bahwa motivasi kerja merupakan kondisi dimana seseorang terdorong atau tergerak untuk berperilaku dan bekerja dengan giat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Motivasi kerja merupakan hal yang paling mendasar seseorang bekerja keras untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Munculnya motivasi kerja biasanya

melibatkan faktor individu dan faktor organisasional. Seperti halnya menurut Faustino (1997) yang membagi indikator motivasi kerja ke golongan faktor individu dan faktor organisasi. Yang tergolong faktor individu yaitu: kebutuhan (needs), tujuan (goals), sikap (attitudes), dan kemampuan (abilities). Sedangkan yang tergolong faktor organisasi, meliputi: pembayaran gaji, keamanan pekerjaan, sesama pekerja, pengawasan, pujian dan pekerjaan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan motivasi kerja terhadap akuntabilitas keuangan daerah telah diteliti oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Tabel 2.2. menunjukkan hasil penelitian-penelitian terdahulu.

Tabel 2.2.

Hasil Penelitian Terdahulu

NO	Penulis & Tahun	Variabel yang Digunakan	Hasil
1.	Herawaty (2011)	<p>Varibel independen: Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan</p> <p>Varibel dependen: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah</p>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Kota Jambi. Sedangkan untuk variabel sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap kinerja

			instansi.
2.	Anjarwati (2012)	<p>Variabel independen: Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan</p> <p>Variabel dependen: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah</p>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
3.	Vina Sukmalinda (2013)	<p>Variabel independen: Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan</p> <p>Variabel dependen: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	Secara simultan kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
4.	Harini Susilowati (2014)	<p>Variabel independen: Kejelasan Sasaran Anggaran</p> <p>Variabel dependen: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah</p>	Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
5.	Angreini dan Sherly (2014)	<p>Variabel independen: Kejelasan Sasaran Anggaran</p> <p>Variabel dependen: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung
6.	Pangumbalerang (2014)	<p>Variabel independen: Kejelasan Sasaran</p>	Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara

		<p>Anggaran</p> <p>Variabel dependen: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	<p>kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</p>
7.	<p>Afillu Hidayatullah dan Irine Herdjiono (2015)</p>	<p>Variabel independen: Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan</p> <p>Variabel dependen: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	<p>Pengujian persial variabel pengendalian Akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,</p>
8.	<p>Zakiyudin dan Suyanto (2015)</p>	<p>Variabel independen: Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan</p> <p>Variabel dependen: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan</p>	<p>Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.</p>
9.	<p>Herdjiono Hidayatullah (2015)</p>	<p>Variabel independen: Kejelasan sasaran anggaran, Pengendalian akuntansi, dan Sistem pelaporan</p> <p>Variabel dependen: Akuntabilitas kinerja SKPD</p>	<p>Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sedangkan pengujian secara simultan menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</p>
.10.	<p>Cahyani dan Utama (2015)</p>	<p>Variabel independen: Kejelasan sasaran anggaran, Pengendalian akuntansi, dan</p>	<p>Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem</p>

		Sistem Pelaporan Variabel dependen: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
11.	Mulyadi (2018)	Variabel Independen: Sistem pelaporan dan Kejelasan Sasaran anggaran Variabel dependen: Akuntabilitas kinerja pemerintah	Sistem pelaporan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi
12.	Ressy Amanda Noviyana (2018)	Variabel Independen: Sistem Pengendalian Internal dan Motivasi Kerja Variabel Dependen: Kinerja Pemerintah Daerah	Motivasi Kerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah diberikan kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah, hal itu tidak terlepas dari misi dan visi yang telah ditetapkan melalui kegiatan, program, atau kebijaksanaan. Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja yang jelas.

Suatu kinerja yang baik tidak terlepas dari pengendalian. Salah satu upaya untuk melakukan pengendalian adalah melalui anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan yang akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Menurut Darma (2004) menyatakan bahwa salah satu jenis pengendalian adalah pengendalian

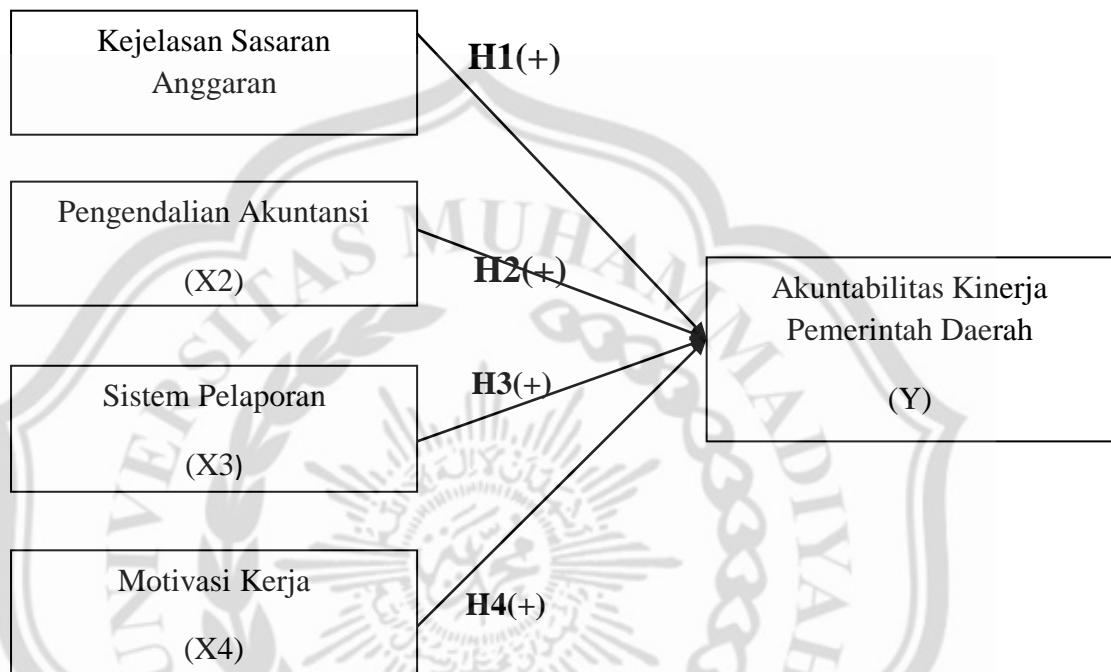
keuangan dengan memanfaatkan sistem akuntansi. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa langkah-langkah penyusunan dan pencatatan telah dilakukan dan tercipta integritas finansial dari aktivitas-aktivitas organisasi.

Bentuk pengendalian keuangan tersebut berhubungan dapat diaplikasikan dalam pelaporan keuangan, maka secara langsung sistem pelaporan turut memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Menurut Abdullah (2005) menyatakan bahwa dalam rangka menciptakan akuntabilitas kinerja, pemerintah daerah selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas aktivitas dan kinerja finansial kepada stakeholdernya. Selain itu pemerintah daerah juga dituntut untuk mampu menjelaskan segala pertanyaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian target-target APBD dan kinerja keuangan (*financial performance*) secara terbuka, dapat dimengeti oleh masyarakat dan stakeholder lainnya.

Netty Herawati (2011) menyatakan bahwa secara parsial kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi berpengaruh negatif, sementara sistem pelaporan secara parsial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, akan tetapi secara simultan kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Berbeda dengan Penelitian sebelumnya dari Indraswari Kusumaningrum (2010)

Menyatakan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan, berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Anggaran daerah harus menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Beberapa peneliti berkaitan tentang kejelasan sasaran anggaran sering dilakukan peneliti seperti, Kenis (1979) meneliti pengaruh karakteristik anggaran terhadap sikap yang berhubungan dengan pekerjaan (*job-related attitudes*) serta kinerja manajerial. Hasilnya adalah bahwa anggaran dan kejelasan

sasaran anggaran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *job-related attitudes* dan *budget related attitudes* juga kepada kinerja. Kenis juga menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran memberikan reaksi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan sasaran anggaran. Reaksi tersebut adalah peningkatan kepuasan kinerja, penurunan ketegangan kerja, peningkatan sikap karyawan terhadap anggaran, kinerja anggaran dan efisien biaya pada pelaksanaan anggaran secara signifikan jika sasaran anggaran dinyatakan secara jelas.

Diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vina Sukmalinda (2013) yang menyatakan bahwa secara parsial kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana semakin jelas sasaran anggaran akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Annisa (2013) Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pada pemerintah. Anggraeni dan Sherly (2014) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kejelasan sasaran anggaran mencerminkan sejauh mana sasaran anggaran dinyatakan secara spesifik, jelas dan dapat dipahami oleh mereka yang bertanggungjawab untuk mencapainya. Sasaran yang tidak jelas atau membingungkan dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakpastian para pelaksana, implikasinya pada penurunan kinerja yang berarti juga penurunan akuntabilitas kinerja organisasi.

Namun sebaliknya, jika kejelasan sasaran anggaran dinyatakan secara jelas maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin meningkat. Berdasarkan uraian diatas, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

2. Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan anggaran sering kali mengalami berbagai kendala atau hal-hal yang kurang diperhatikan sebelumnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui dan menghindari kendala tersebut SKPD memerlukan peran pengendalian akuntansi yang handal. Apabila SKPD memiliki pengendalian akuntansi yang handal dan diterapkan dengan praktik yang sehat maka informasi akuntansi yang dihasilkan akan semakin valid dan dapat digunakan oleh stakeholder dalam pengambilan keputusan. Selain itu dengan informasi akuntansi tersebut akan menambah kepercayaan para stakeholder yang nantinya akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan.

Diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Cahyani dan Utama (2015) menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Afili Hidayattullah dan Irine Herdjiono (2015) menyatakan bahwa pengujian persial variabel pengendalian akuntansi berpengaruh

positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Vina Sukmalinda (2013) menyatakan bahwa secara parsial pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana semakin baik pengendalian akuntansi akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Ekonomis, efisien, dan efektifitas pelayanan dari instansi pemerintah daerah kepada masyarakat, merupakan indikator kinerja pemerintah daerah. Tercapainya indikator tersebut merupakan suatu prestasi yang dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang bersangkutan. Semakin tinggi pengendalian akuntansi yang diterapkan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah semakin meningkat. Maka hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:

H2: Pengendalian Akuntansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

3. Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Teori stakeholder menekankan akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana (Rokhlinasari, 2016). Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh stakeholder (Rokhlinasari, 2016). Kewajiban pihak SKPD untuk

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak stakeholder. Setiap SKPD diwajibkan untuk melaporkan kepada publik mengenai aktivitas apa saja yang telah mereka lakukan termasuk posisi keuangan instansi tersebut.

Diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Zakiyudin dan Suyanto (2015) sistem pelaporan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja. Herdjiono Hidayatullah (2015) pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Mulyadi (2018) menyatakan bahwa sistem pelaporan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi.

H3 : Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

4. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Motivasi kerja dapat diartikan sebagai dorongan yang tumbuh dalam diri seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan semangat tinggi menggunakan semua kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya yang bertujuan untuk mendapatkan hasil kerja sehingga mencapai kepuasan sesuai keinginannya. Kepuasan sendiri umumnya dapat tercipta apabila seseorang pegawai telah menyelesaikan pekerjaannya dan mendapatkan capaian kerja yang memuaskan. Orang yang mempunyai motivasi kerja tinggi tentunya akan melakukan cara

agar keadaan instansi atau organisasinya dinilai baik. Potret instansi pemerintahan yang dinilai baik tentunya yang memiliki kinerja baik pula terhadap publik. Publik memiliki hak untuk mengetahui semisal anggaran yang dititipkan akan digunakan untuk apa, apakah digunakan sewajarnya atau tidak. Publik akan mengetahui hal tersebut dengan diterapkannya akuntabilitas publik.

Akuntabilitas publik dicerminkan oleh instansi publik berupa Laporan Hasil Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas publik harus dilaporkan sewajarnya dan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki motivasi kerja tinggi akan berusaha untuk mencapai kerja yang maksimal demi nama baik instansi dan demi kepuasan diri seseorang dalam melakukan pekerjaan. Tentunya karena hasil dari kerjanya yang meliputi penyusunan anggaran maupun penerapan ketentuan yang berlaku akan dipertanggungjawabkan hasilnya kepada publik (Susilowati, 2014).

Semakin tinggi dorongan motivasi kerja seorang pegawai maka akan semakin baik pula tingkat akuntabilitas publik dari suatu instansi pemerintah. Pegawai yang memiliki dorongan motivasi dalam diri tentunya akan mengerahkan semua tenaga dan pikirannya demi hasil kerja yang bagus sehingga publik akan yakin dengan hasil kerja tersebut setelah dipublikasikan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zirman, dkk (2010) yang menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Namun berbeda hasil dengan Susilowati (2014) yang

menunjukkan hasil motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Atas dasar tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H4: Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah

